

Analisis Atribut Sensitif Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Fredi Saipul Yusuf¹⁾, Hamzah¹⁾, Marwoto¹⁾

E-mail : frediyusuf@gmail.com

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi

Abstract

Sampah rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar sampah yang ada di TPA. Pengelolaan sampah diperlukan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah yang dihasilkan. Pengelolaan sampah merupakan suatu upaya untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Perilaku rumah tangga dalam pengelolaan sampah seperti membuang sampah dengan mencari lahan kosong dan dibakar atau langsung dibuang ke sungai dapat mengakibatkan berbagai macam masalah terhadap kesehatan lingkungan. Tujuan penelitian menganalisis gambaran perilaku pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Batang Hari serta menganalisis pengaruh sosial ekonomi terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga. Lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Muara Bulian. Data primer didapatkan dengan alat pengumpul data berupa kuesioner. Data diolah menggunakan SPSS dengan uji regresi logistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan alat pengumpul data berupa kuesioner. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Jumlah sampel sebanyak 99 responden diambil dengan teknik random sampling. Variabel bebas penelitian ini adalah faktor sosial ekonomi (umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan pengetahuan, sedangkan variabel terikat yaitu perilaku pengelolaan sampah rumah tangga). Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menggunakan regresi logistik maka dapat diperoleh bahwa Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Muara Bulian masih dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 7,25 dari nilai maksimal 10. Sedangkan untuk pengaruh sosial ekonomi terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga dengan tingkat signifikansi ($0.001 < 0.05$) sehingga dapat disimpulkan faktor sosial ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga.

Kata kunci : Sosial Ekonomi, Perilaku Masyarakat, Sampah Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Upaya untuk mengintegrasikan manajemen hutan dengan pembangunan masyarakat desa, sudah mulai ditangkap dan diterapkan oleh pemerintah. Menurut Awang (2007), terkait pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan ekonominya dari hutan, respon pemerintah sudah ditunjukkan melalui perubahan paradigma pembangunan kehutanan. Dahulu paradigma pembangunan kehutanan berbasis pada *State Based Centred* atau benar-benar dikendalikan oleh pemerintah dan hanya berbasis kayu, maka saat ini mulai bergeser pada paradigma *Community Based Forest Management (CBFM)*.

Perubahan paradigma tersebut dilakukan pemerintah melalui terbitnya berbagai kebijakan yang berkenaan CBFM yang kemudian kita kenal sebagai Perhutanan Sosial. HTR merupakan skema Perhutanan Sosial yang menjadi salah satu program strategis dalam upaya peningkatan produksi kayu nasional, yang saat ini mengalami kekurangan pasokan. Pertumbuhan produksi dan kebutuhan bahan baku kayu industri setiap tahun terus meningkat, bersamaan dengan penurunan kemampuan pasokan kayu dari hutan alam (Midi & Mando, 2015).

Effendi & Budiningsih (2013), melakukan penelitian efektivitas implementasi kebijakan HTR di Kalimantan Selatan. Berdasarkan penelitiannya, ditinjau dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan, implementasi HTR masih kurang efektif. Penelitian efektivitas juga dilakukan Salaka *et al.* (2020), terhadap kelembagaan pengelolaan HTR di tingkat lokal. Dari penelitian yang dilakukan di Provinsi Jambi dan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dilaporkan, pelaksanaan kegiatan HTR pada kelompok yang sudah mendapat dukungan dana dari BLU, umumnya gagal bahkan sejak RKT tahun ke 1.

Kabupaten Bengkulu Selatan, memiliki 8 koperasi yang telah mendapatkan IUPHHK-HTR, dengan luas total area mencapai 3.947 ha. Area IUPHHK-HTR yang terbit bersamaan di tahun 2013 tersebut, tersebar di 5 (lima) desa, dalam 2 (dua) kecamatan. Kurniawati *et al.* (2021), yang melakukan penelitian Evaluasi Implementasi HTR di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, melaporkan masih ada beberapa masalah dalam implementasi kebijakan HTR. Diantaranya, masih terdapat perbedaan persepsi terhadap tujuan kebijakan HTR, asumsi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, struktur implementasi yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta tingkat kemampuan *stakeholder* dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan masih rendah.

Kondisi dan permasalahan tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberlanjutan pengelolaan HTR. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis atribut sensitif keberlanjutan pengelolaan HTR di Bengkulu Selatan. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menyusun skala prioritas

peingkatan indeks keberlanjutan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis atribut sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan.

METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Oktober hingga November 2023, di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Peta Fungsi Kawasan, area HTR tersebut berada pada 3 (tiga) Kelompok Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi. Antara lain: Kelompok Hutan Bukit Rabang, Kelompok Hutan Peraduan Tinggi, dan Kelompok Hutan Air Bangkenang.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *nonprobability sampling* metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel atau responden dalam penelitian ini adalah, para pihak yang secara langsung berkepentingan dan mengetahui kondisi dimensi kelembagaan, ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dari HTR di Bengkulu Selatan.

Analisis Data

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, dilakukan dengan menggambarkan kondisi pengelolaan HTR di Bengkulu Selatan, lalu menganalisisnya menggunakan Rappfish. Analisis Rappfish menggunakan teknik statistik *multidimensional scaling* (MDS) untuk melakukan penilaian secara cepat terhadap status keberlanjutan suatu sistem.

Tahapan analisis MDS-Rappfish meliputi tahap konsepsi dan tahap operasional. Tahap konsepsi merupakan tahap penyusunan konsep penelitian, meliputi (Yusuf *et al.*, 2021):

- a. Menentukan fokus kajian
- b. Menentukan unit analisis penelitian, yakni berupa lokasi (area), unit (stasiun), jenis (tipe) yang ke semuanya dapat dievaluasi.
- c. Menentukan dimensi kajian dan menentukan atribut dari setiap dimensi kajian.
- d. Menyusun skoring (*bad-good*) pada setiap atribut, dalam penelitian ini skor 0 = buruk, skor 1 = sedang, dan skor 2 = baik
- e. Menginput nilai/skor hasil penelitian dari masing-masing atribut ke *software Rappfish*.
- f. Menyusun *Matriks References* dan metrik *Anchor*
- g. Menjalankan *Rap Analysis* untuk mendapatkan atribut sensitive

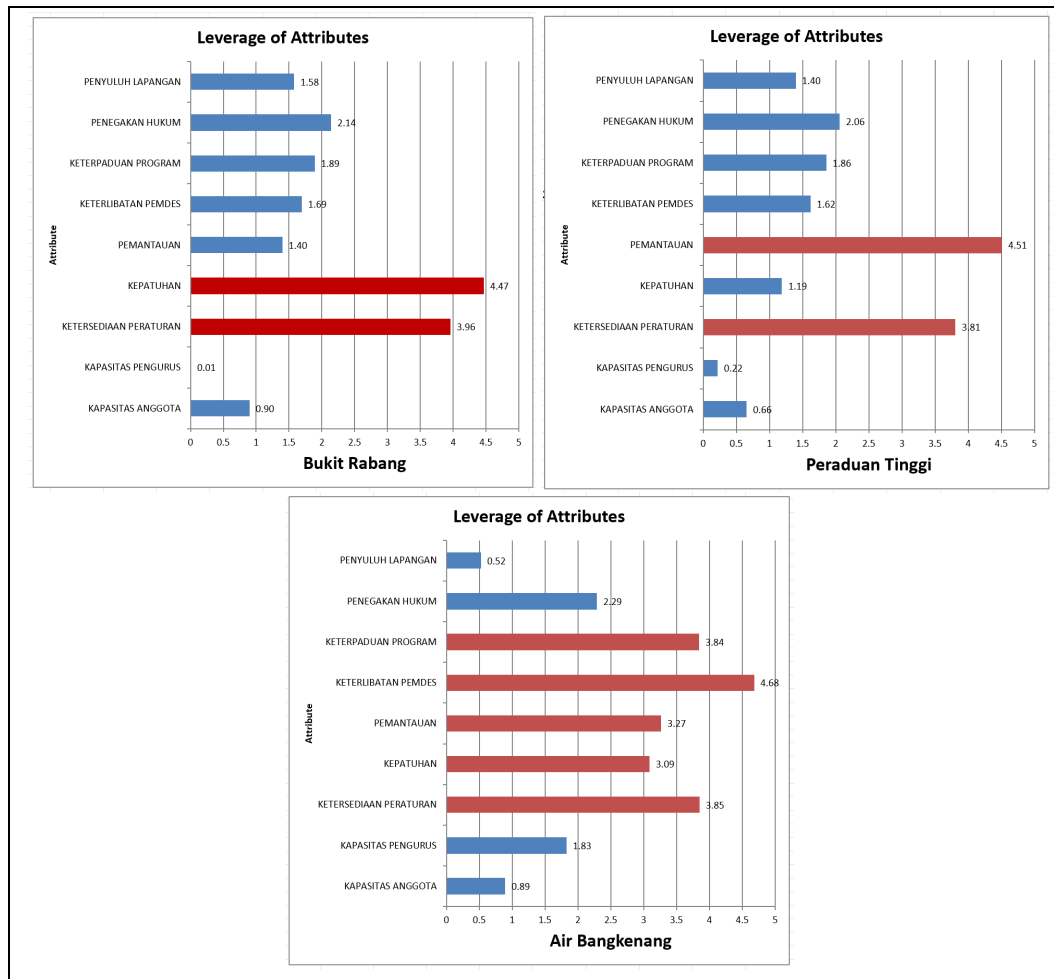
Penentuan atribut sensitif (atribut pengungkit utama) dilakukan dengan pendekatan Hukum Nilai Tengah, yakni hukum dimana atribu sensitif ditetapkan berdasarkan nilai diatas rata-rata

variabel atribut yang dianalisis. Untuk mendapatkannya dilakukan dari nilai RMS tertinggi dibagi 2, sehingga angka diatas nilai tersebut masuk dalam kategori atribut sensitive.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Atribut sensitif dimensi kelembagaan

Analisis atribut sensitif dimensi kelembagaan dilakukan dengan menggunakan 9 atribut yang diduga berpengaruh terhadap indeks keberlanjutan, diantaranya: 1) Tingkat kepatuhan anggota terhadap aturan pengelolaan HTR, 2) Kapasitas anggota dalam pengelolaan HTR, 3) Pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan oleh pengurus HTR, 4) Penegakan hukum, 5) Keterpaduan program pengelolaan dengan sektor lain, 6) Keterlibatan Pemerintah Desa dalam pengelolaan HTR, 7) Ketersediaan peraturan yang disusun oleh kelompok dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di area HTR, 8) Ketersediaan penyuluh lapangan yang mendampingi kegiatan kelompok, 9) Kapasitas pengurus dalam pengelolaan HTR. Keluaran data atribut sensitif dimensi kelembagaan, yang dianalisis berdasarkan skoring dari pendapat responden menggunakan Rappfish dapat dilihat pada Gambar 1.



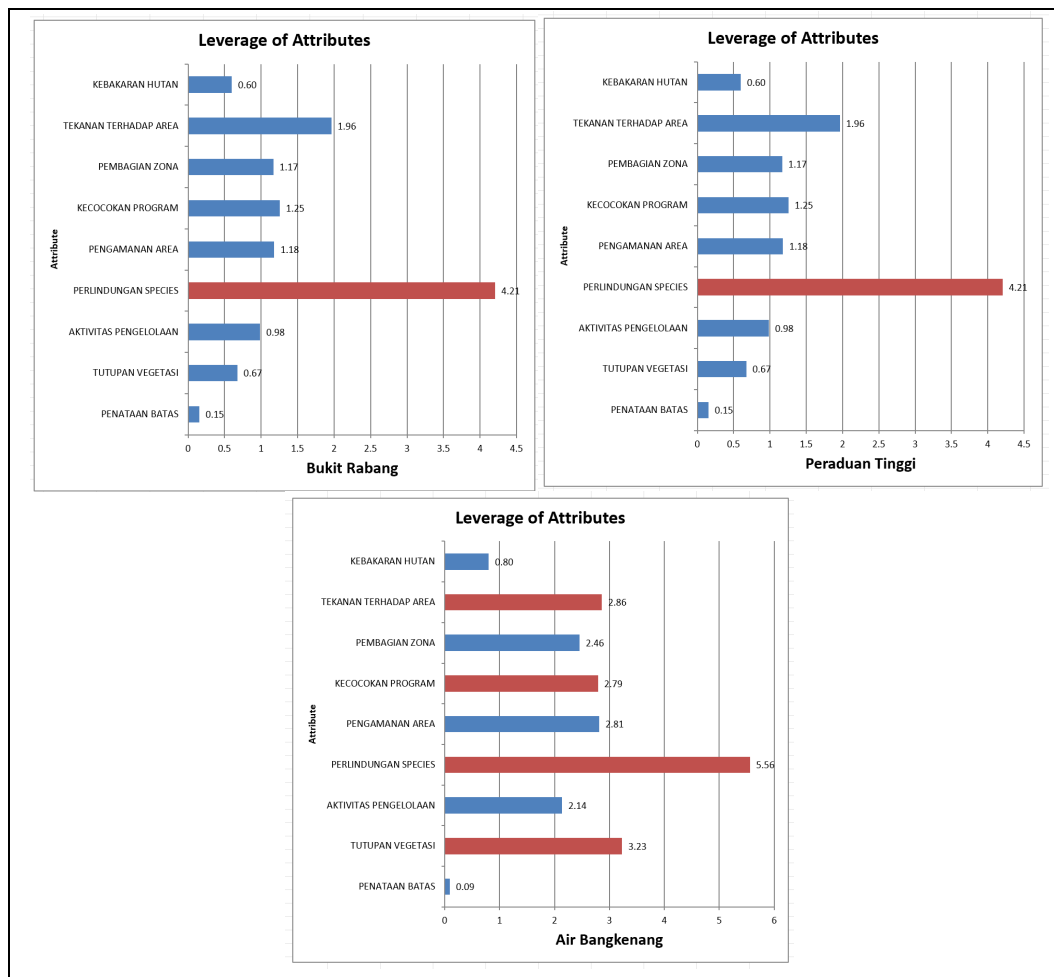
Gambar 1. Atribut sensitif dimensi kelembagaan

Dari Gambar 2 terlihat bahwa atribut sensitif dimensi kelembagaan yang muncul pada masing-masing Kelompok Hutan memiliki jumlah dan jenis yang berbeda. Terdapat 2 atribut sensitif yang muncul pada Kelompok Hutan Bukit Rabang, terdiri dari: 1) Pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan oleh pengurus HTR, dan 2) Ketersediaan peraturan yang disusun oleh kelompok dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Terdapat 2 atribut sensitif yang muncul pada Kelompok Hutan Peraduan Tinggi, terdiri dari: 1) Tingkat kepatuhan anggota terhadap aturan pengelolaan HTR, dan 2) Ketersediaan peraturan yang disusun oleh kelompok dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Terdapat 5 atribut sensitif yang muncul pada Kelompok Hutan Air Bangkenang, terdiri dari: 1) Keterpaduan program pengelolaan dengan sektor lain, 2) Keterlibatan Pemerintah Desa dalam pengelolaan HTR, 3) Pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan oleh pengurus HTR, 4) Tingkat kepatuhan anggota terhadap aturan pengelolaan HTR, dan 5) Ketersediaan peraturan yang disusun oleh kelompok dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di area HTR. Terdapat 1 atribut sensitif yang muncul pada semua Kelompok Hutan, yaitu “Ketersediaan peraturan yang disusun oleh kelompok dalam pengelolaan Sumber Daya Alam

(SDA) di area HTR”. Kemudian terdapat 1 atribut yang muncul pada Kelompok Hutan Peraduan Tinggi dan Kelompok Hutan, yaitu: “Pemantauan dan pengawasan kegiatan pengelolaan oleh pengurus HTR”.

Atribut sensitif dimensi ekologi

Analisis atribut sensitif dimensi ekologi dilakukan dengan menggunakan 9 atribut yang diduga berpengaruh terhadap indeks keberlanjutan, diantaranya: 1) Penataan batas area kerja HTR, 2) Tutupan vegetasi pohon pada area HTR, 3) Aktivitas pengelolaan area HTR, 4) Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna langka, 5) Perlindungan dan pengamanan area HTR, 6) Kecocokan tujuan program HTR dengan aktivitas anggota, 7) Pembagian zona telah mampu mengakomodir kebutuhan anggota, 8) Tekanan terhadap area HTR, 9) Kebakaran hutan. Keluaran data atribut sensitif dimensi ekologi, yang dianalisis berdasarkan skoring dari pendapat responden menggunakan Rapfish dapat dilihat pada Gambar 2.



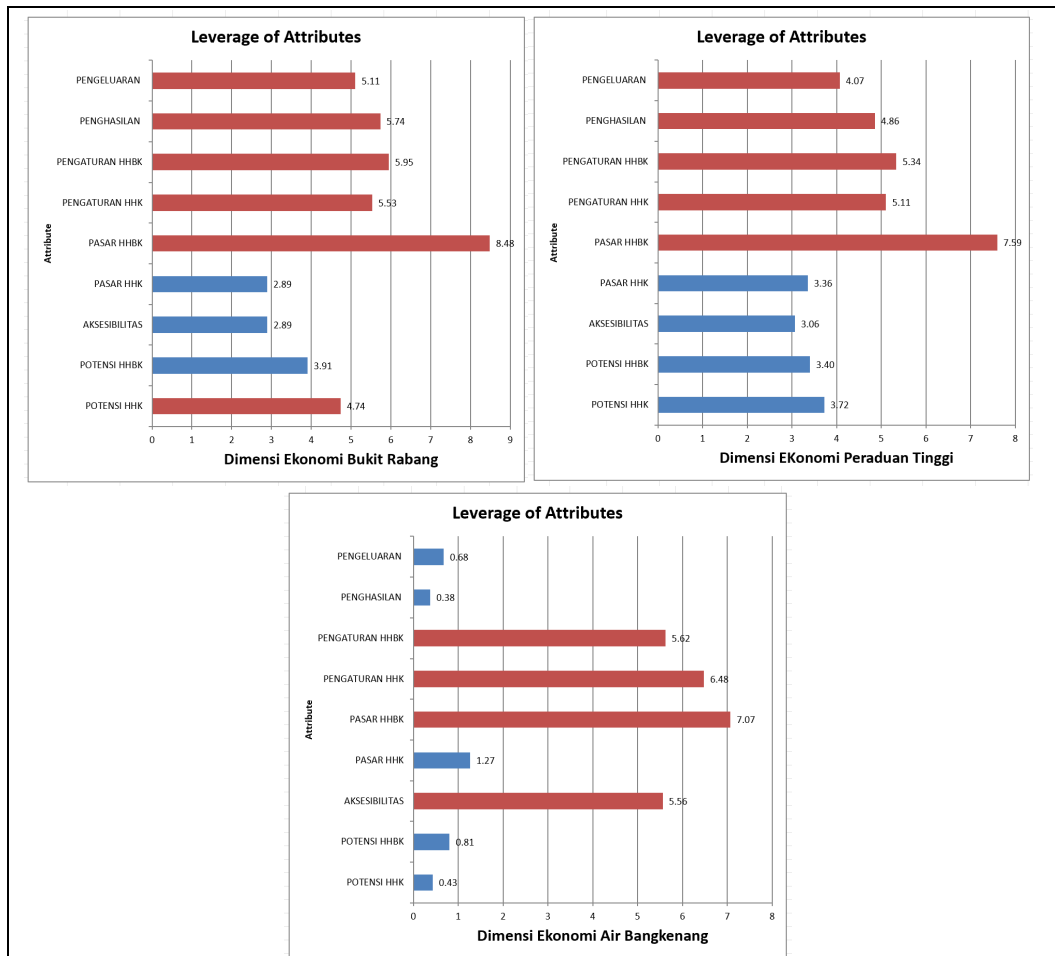
Gambar 2. Atribut sensitif dimensi ekologi

Dari Gambar 2 terlihat bahwa atribut sensitif dimensi kelembagaan yang muncul pada masing-masing Kelompok Hutan memiliki jumlah dan jenis yang berbeda. Terdapat 1 atribut sensitif yang muncul pada semua Kelompok, yaitu: “Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna langka”. Atribut tersebut, juga merupakan satu-satunya atribut yang muncul pada Kelompok Hutan Bukit Rabang dan Kelompok Peraduan Tinggi. Terdapat 4 atribut sensitif yang muncul pada Kelompok Hutan Air Bangkenang, terdiri dari: 1) Tekanan terhadap area HTR, 2) Kecocokan tujuan program HTR dengan aktivitas anggota, 3) Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna langka, dan 4) Tutupan vegetasi pohon pada area HTR.

Atribut sensitif dimensi ekonomi

Analisis atribut sensitif dimensi ekonomi dilakukan dengan menggunakan 9 atribut yang diduga berpengaruh terhadap indeks keberlanjutan, diantaranya: 1) Rata-rata penghasilan anggota, 2) Rata-rata pengeluaran anggota, 3) Aksesibilitas area HTR, 4) Potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam peningkatan pendapatan anggota, 5) Pengaturan pemanfaatan HHBK, 6) Keberadaan pasar produk HHBK, 7) Potensi hasil hutan kayu (HHK) dalam peningkatan pendapatan masyarakat, 8) Pengaturan pemanfaatan HHK, 9) Keberadaan pasar produk HHK. Keluaran data atribut sensitif dimensi ekonomi, yang dianalisis berdasarkan skoring dari pendapat responden menggunakan Rappfish dapat dilihat pada Gambar 3.

Dari Gambar 3 terlihat bahwa atribut sensitif dimensi ekologi yang muncul pada masing-masing Kelompok Hutan memiliki kesamaan maupun perbedaan jumlah dan jenisnya. Terdapat 3 atribut sensitif sama, yang muncul pada 3 Kelompok Hutan, terdiri dari: 1) Pengaturan pemanfaatan HHBK, 2) Pengaturan pemanfaatan HHK, dan 2) Keberadaan pasar produk HHBK. Terdapat 2 atribut yang sama di Kelompok Hutan Bukit Rabang dan Kelompok Hutan Peraduan Tinggi, terdiri dari: 1) Rata-rata pengeluaran anggota, dan 2) Rata-rata penghasilan anggota. Terdapat 1 atribut berbeda Kelompok Hutan Bukit Rabang, yaitu: 1) Potensi HHK dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Terdapat 1 atribut berbeda Kelompok Hutan Peraduan Tinggi, yaitu: 1) Aksesibilitas area HTR.



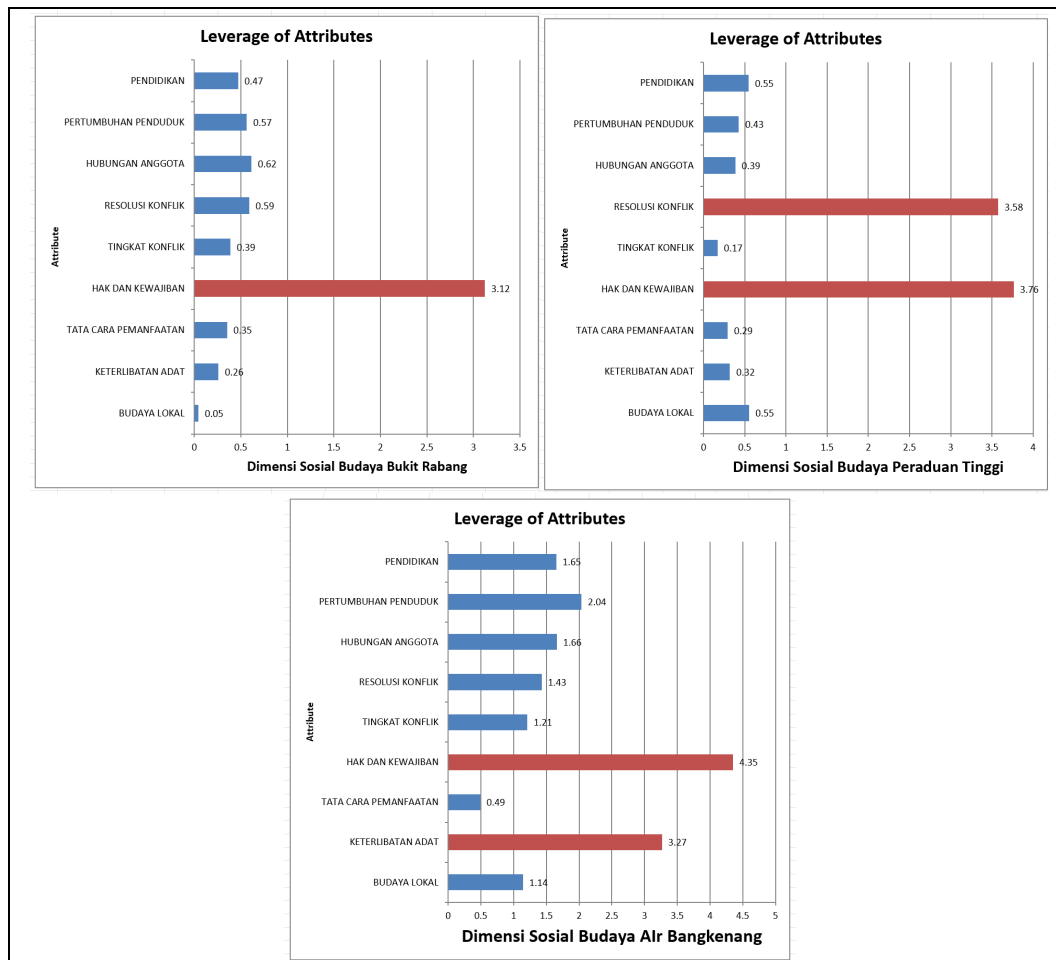
Gambar 3. Atribut sensitif dimensi ekonomi

Atribut sensitif dimensi sosial budaya

Analisis atribut sensitif dimensi sosial budaya dilakukan dengan menggunakan 9 atribut yang diduga berpengaruh terhadap indeks keberlanjutan, diantaranya: 1) Tingkat pertumbuhan penduduk desa di lokasi HTR, 2) Tingkat pendidikan anggota, 3) Mekanisme resolusi konflik penguasaan lahan, 4) Tingkat terjadinya konflik pemanfaatan SDA, 5) Keseimbangan hak dan kewajiban *stakeholder* dalam pemanfaatan area HTR, 6) Ketersediaan tata cara pemanfaatan kawasan HTR, 7) Terdapat hubungan saling percaya antara anggota kelompok, 8) Praktek budaya lokal dalam pelestarian kawasan HTR, 9) Keterlibatan lembaga adat dalam pengelolaan HTR. Keluaran data atribut sensitif dimensi sosial budaya, yang dianalisis berdasarkan skoring dari pendapat responden menggunakan Rappfish dapat dilihat pada Gambar 4.

Dari Gambar 4 terlihat bahwa atribut sensitif dimensi sosial budaya yang muncul pada masing-masing Kelompok Hutan sebanyak 1 atribut di Kelompok Hutan Bukit Rabang dan Kelompok Hutan Peraduan Tinggi, serta 2 atribut pada Kelompok Hutan Air Bangkenang. Terdapat 1 atribut sensitif sama yang muncul pada semua kelompok hutan, yaitu: Keseimbangan

hak dan kewajiban *stakeholder* dalam pemanfaatan area HTR. Terdapat 1 atribut sensitif berbeda yang muncul pada Kelompok Hutan Peraduan Tinggi, yaitu: Mekanisme resolusi konflik penguasaan lahan. Kemudian, terdapat juga 1 atribut sensitif berbeda yang muncul pada Kelompok Hutan Air Bangkenang, yaitu: Keterlibatan lembaga adat dalam pengelolaan HTR.



Gambar 4. Atribut sensitif dimensi sosial budaya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah diuraikan, terdapat 1 hingga 6 atribut sensitif yang muncul pada setiap dimensi di Masing-masing Kelompok Hutan. Atribut sensitif tersebut perlu perhatian dan dijadikan skala prioritas dalam Pengelolaan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan, supaya indeks keberlanjutannya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

© 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi

Citation: Fredi. (2024) *Analisis Atribut Sensitif Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Bengkulu Selatan* Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1); 35 – 44 doi : 10.22437/jpb.v7i1.34572

- Awang, S. A. 2007. Politik Kehutanan Masyarakat. Jogjakarta: Kreasi Wacana.
- Effendi, R., & K. Budiningsih. 2013. Efektivitas Implementasi Kebijakan HTR di Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis* Volume 1 No. 3, Edisi November 2013.
- Kurniawati, A. 2021. Evaluasi Implementasi Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu (studi kasus di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan). *Tesis Master Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Universitas Bengkulu.
- Midi, L. O. & Mando, L. O. A. S. (2015). Penaksiran Potensi Kayu Dari Hutan Rakyat di Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna. *Ecogreen*, 1(1), 89- 100.
- Salaka, F, J., I. Alviya, E. Y. Suryandari, F. Nurfatmiani, M. Z. Muttaqin. 2020. Efektivitas kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat di tingkat lokal. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 17 No.1, Mei 2020: 75-92.
- Sugiyono. 2019. *Statistik Untuk Penelitian (Cetakan 30)*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Yusuf, M., M. Wijaya, R.A. Surya, I. Taufik. 2021. *MDRS-RAPS Teknik Analisis Keberlanjutan*. CV. Tohar Media. Makassar.